

Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure, Capital Intensity, dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness

Septiani Indriapraja¹⁾; Riaty Handayani²⁾

¹⁾ Indripraja2309@gmail.com, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

²⁾ riatyhan16@gmail.com, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

Article Informatin:

Abstract

*Corporate Social Responsibility;
Capital Intensity;
Corporate Governance;
Tax Aggressiveness;*

Article History:

Received : January 17, 2019
Revised : February 10, 2019
Accepted : March 14, 2019

Article Doi:

<http://doi.org/10.22441/tekun.v10i1.17431>

This study aims to analyze the effect of Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, and Corporate Governance Disclosure on Tax Aggressiveness. Data collection techniques using purposive sampling. The data used is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (www.idx.com). The data analysis method used in this study is multiple regression analysis. The results showed that the disclosure of Corporate Social Responsibility has a positive effect on tax aggressiveness. Institutional ownership has a negative effect on tax aggressiveness. Meanwhile, Capital Intensity, Audit Committee, and Board of Commissioners proportion do not have an effect on tax aggressiveness.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Corporate Governance terhadap Tax Aggressiveness. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.com) Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap tax aggressiveness, Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap tax aggressiveness. Sedangkan Capital Intensity, Komite Audit, Proporsi dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness.

Kata Kunci: corporate social responsibility, capital intensity, corporate governance, tax aggressiveness

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2016:1). Dalam pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat, sektor pajak memiliki peran sangat penting dan berkontribusi penerimaan negara dengan porsi terbesar. Penerimaan negara tidak lagi dihasilkan dari minyak dan gas bumi tetapi menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Waluyo (2011:2) mengatakan, "Bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak".

Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang

ditanggungnya (Ardyansah, 2014). Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan tax planning atau dengan agresivitas pajak. Pajak agresif didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong tax evasion. Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif. Pengukuran agresivitas pajak dapat dilakukan dengan menggunakan proksi tarif pajak efektif (effective tax rate/ETR). Salah satu cara mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya.

PT RNI sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan singapura. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Modal yang di jadikan hutang dapat mengurangi pajak, sehingga perusahaan tersebut bisa terhindar dari kewajiban. Jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar, praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. (money.kompas.com)

Kasus di atas memberikan bukti bahwa masih banyaknya perusahaan berusaha untuk melakukan agresivitas pajak untuk memanipulasi laba fiskal dengan cara perencanaan pajak diklasifikasikan atau tidak termasuk menjadi tax evasion. Beberapa cara yang kerap kali dipergunakan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yakni dengan melakukan dan mengungkapkan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR), berinvestasi pada aset tetap (Capital Intensity) dan tata kelola perusahaan (Corporate Governance). Beberapa hal yang diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak antara lain Corporate Social Responsibility (CSR). Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dengan membayar pajak, perusahaan telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional guna kesejahteraan masyarakat luas. Sebuah perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif maka dapat disebut sebagai perusahaan yang tidak bertanggungjawab secara sosial, Mustika (2017). Corporate social responsibility diprosikan dalam pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR menggunakan indikator Global Reporting Initiative yang didapatkan dari website www.globalreporting.org. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) telah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) maka semakin rendah agresivitas yang dilakukan perusahaan. Namun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jessica dan Toly (2014) mengungkapkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, property. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau dengan tujuan administrative dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Capital intensity juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. (Indradi, 2018) Capital intensity sangat berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap menjadikan beban depresiasi aset tetap semakin meningkat. Hal ini akan berimplikasi terhadap laba perusahaan yang semakin menurun, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun.

Hasil penelitian oleh Putri (2014) menemukan bahwa capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif. Hasil penelitian berbeda diperoleh Nugraha dan Meiranto (2015) dan Ardyansah dan Zulaikha (2014) menemukan bahwa capital intensity berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian Mustika (2017) dapat menyimpulkan bahwa variabel capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya variabel yang mungkin berpengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu Corporate Governance (tata kelola perusahaan). Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan untuk menentukan arah kinerja perusahaan yang baik, efektif dan efisien (Maharani dan Suardana, 2014). Dalam mekanisme corporate governance telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan perusahaan agar perusahaan dapat berkembang tapi tidak melanggar aturan pemerintah, seperti dalam hal membayar pajak (Putri, 2014). Perusahaan yang telah menerapkan corporate governance diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena corporate governance dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham (Putri, 2014). Proksi dari corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris. Hubungan corporate governance dengan agresivitas pajak karena perusahaan merupakan wajib pajak dan aturan dalam struktur corporate governance mempengaruhi cara sebuah perusahaan memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi, di sisi lain agresivitas pajak juga tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan (Friese et al, 2016). Ketika dinamika corporate governance tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Penerapan corporate governance dalam menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan laba yang besar, namun laba yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Sehingga akan timbul peluang untuk melakukan praktik agresivitas pajak (Diantari dan Ulupui, 2016).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perilaku yang Direncanakan (Planned Behavior)

Teori Perilaku yang Direncanakan atau Theory of Planned Behavior, merupakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan sebagai perantaranya dan dapat berdampak pada hal-hal tertentu saja (Ajzen, 1991). Teori ini juga berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana.

Ada 3 (tiga) indikator yang digunakan dalam Theory of Planned Behavior mengenai pengukuran kontrol keprilakuan wajib pajak, yaitu (1) Kemungkinan diperiksa oleh pihak fiskus, (2) Kemungkinan dikenakannya sanksi dan (3) Kemungkinan adanya pelaporan dari pihak ketiga (Bobek dan Harfiled, 2003).

Hubungan dari teori ini dengan tindakan Agresivitas Pajak adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan penghindaran pajak. Dalam konteks ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri. Selain rasionalitas, lingkungan yang juga berpengaruh karena akan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang berpengaruh pada keputusan perilaku.

Agresivitas Pajak (Tax Aggressiveness)

Tindak pajak agresif, yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong legal (Tax Avoidance) maupun yang tergolong ilegal (Tax Evasion), (Sumarsan, 2013:8). Agresivitas pajak ialah tindakan yang tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga berasal dari kegiatan penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Rusydi dan Martani, 2014).

Sedangkan agresivitas pajak menurut Hadi dan Mangoting (2014), adalah suatu tindakan atau strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan guna mengurangi beban pajak yang ditanggung, dengan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan menggunakan celah hukum. Jadi, agresivitas pajak ialah suatu cara yang ditempuh oleh perusahaan dengan meminimalisir laba kena pajaknya, guna memperkecil kewajiban pajaknya.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Kuriah dan Asyik (2016) CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Sedangkan pengertian lainnya Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu media yang digunakan oleh perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan entitasnya tetapi juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosialnya sebagai tanda komitmen berkelanjutan dari perusahaan (Nuha et al., 2014).

Untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility, penelitian ini berdasarkan standar GRI (Global Reporting Initiative) G4. Perjalanan panjang panduan laporan keberlanjutan (sustainability reporting guidelines) yang dimotori GRI berawal dari tahun 1997. Saat itu GRI baru dibentuk di Boston, Amerika Serikat, oleh United Nations Environment Programme (UNEP), Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES), dan Tellus Institute. Setelah dibentuk, GRI melahirkan panduan laporan keberlanjutan untuk pertama kalinya pada tahun 2000 (<http://majalahcsr.id/peluncuran-gri-standards-2018-membaca-arah-akuntabilitasmasa-depan/>).

Capital Intensity

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah rasio yang menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan property (Andhari dan Sukartha, 2017). Menurut PSAK 16 (revisi 2015) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Dalam penelitian ini capital intensity diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan (Ardyansyah, 2014). Rodriguez dan Arias (2012) dalam Ardyansah (2014) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Corporate Governance

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGHI, 2001) dalam Utami dan Setyawan (2015), corporate governance didefinisikan sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return 19 atas investasinya dengan benar. Corporate governance membantu menciptakan lingkungan kondusif untuk terciptanya pertumbuhan yang efisien di sektor korporat (Laksana, 2015). Pada penelitian ini corporate governance menggunakan proksi komite audit, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris.

Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Damayanti dan Susanto, 2015).

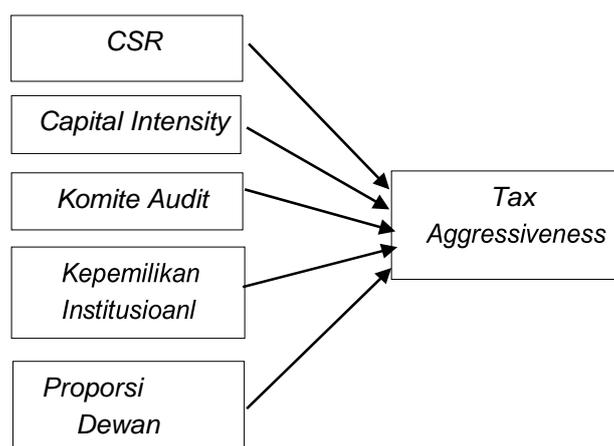
Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain Wien (2010) dalam Diantari dan Ulupui (2016). Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Damayanti dan Susanto, 2015).

Proporsi Dewan Komisaris

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Jumlah dewan komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris (Cahyono et al., 2016).

Penelitian ini terdapat variabel independen yaitu CSR, Capital Intensity dan Corporate Governance. Sedangkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Tax Aggressiveness. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018. Rerangka penelitian disusun sebagai berikut :



Gambar 3.1 Rerangka Pemikiran

1. Hipotesis

1) Pengaruh CSR Terhadap *Tax Aggressiveness*

CSR adalah salah satu cara perusahaan untuk menghindari pajak dengan menghabiskan banyak uang biaya penelitian yang dilakukan di Indonesia. Biaya penelitian yang dihabiskan dimasukkan dalam CSR dan pajak memungkinkannya sebagai biaya. Semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab CSR yang dibuat oleh perusahaan, perusahaan dengan agresivitas pajak yang lebih sedikit diharapkan. Hal ini terjadi karena jika perusahaan melakukan agresivitas pajak terkait CSR, maka akan terjadi kehilangan reputasinya di mata para pemangku kepentingan dan akan menghilangkan dampak positif terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan. Harjito et al. (2017).

H1: CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2) Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Capital intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Capital Intensity berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap karena menjadikan beban depresiasi aset tetap semakin meningkat. Hal ini akan berimplikasi terhadap laba perusahaan yang semakin menurun, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun (Andhari dan Sukartha, 2017) Sehingga semakin tinggi capital intensity perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan.

H2: Capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

3) Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Aggressiveness*

Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Dengan kewenangan yang dimiliki komite audit dapat mencegah tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan (Diantari dan Ulupui, 2016). Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk tidak

melakukan agresivitas pajak. Sehingga, semakin tinggi tingkat komite audit maka semakin rendah agresivitas pajak perusahaan.

H3: Komite Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4) Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Aggressiveness*

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif (Diantari dan Ulupui, 2016). Menurut Shleifer dan Vishney (1986) dalam Putri dan Lautania (2016) berpendapat bahwa kepemilikan institusional, dengan kepemilikan saham yang besar dan hak suara, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan kepentingan pribadinya. Kepemilikan institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh institusional membuat pengawasan terhadap manajemen juga akan meningkat. Hal tersebut membuat pemegang saham akan berusaha sebisa mungkin mengarahkan perusahaan untuk tidak meminimalkan beban pajaknya.

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

5) Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Terhadap *Tax Aggressiveness*

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait (Diantari dan Ulupui, 2016). Semakin besar proporsi komisaris independen maka perilaku agresif terhadap pajak perusahaan yang dilakukan manajemen akan berkurang dan semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya agresivitas pajak (Suyanto dan Supramono, 2012)

H5: Kepemilikan Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

METODE

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian model kausal dengan pendekatan kuantitatif. Model kausal ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau lebih variabel bebas (variabel dependen) dan variabel terkait (variabel independen).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 sampai dengan tahun 2018 yang menerbitkan laporan keuangan tahunan (annual report).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{—————} ETR =$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 5.1
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	104	,066	,596	,26662	,064064
CSR	104	,077	,615	,25169	,107556
Capital Intensity	104	,059	,673	,35489	,146883
Komite Audit	104	3	4	3,09	,283
Kepemilikan Institusional	104	,051	,978	,72968	,197143
Dewan Komisaris Independen	104	,200	,800	,41310	,113918
Valid N (listwise)	104				

Sumber: Hasil olah data SPSS

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum agresivitas pajak sebesar 0.066 (6%) yang dimiliki oleh PT Mandom Indonesia Tbk. tahun 2017, dimana beban pajaknya kecil dan mempunyai laba setelah pajaknya tinggi. Nilai effective tax rate yang rendah ini membuktikan bahwa penghindaran pajak yang terjadi pada PT Mandom Indonesia Tbk. tinggi. Nilai maksimum sebesar 0.596 (59,6%) yang dimiliki oleh PT Budi Starch dan Sweetener Tbk. tahun 2015, yang mempunyai beban pajak tinggi dan laba sebelum pajak yang rendah sehingga menghasilkan nilai effective tax rate tinggi. PT Budi Starch dan Sweetener Tbk. dikatakan mempunyai effective tax rate yang baik karena melebihi tax rate di Indonesia yaitu 25%. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.26662 lebih besar dari standar deviasi yaitu 0.064064, menunjukkan ukuran penyebaran agresivitas pajak memiliki varian atau sebaran yang kecil. Sehingga dapat dikatakan data yang digunakan merupakan data yang baik.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum CSR sebesar 0.077 (7,7%) yang dimiliki oleh PT Siantar Top Tbk tahun 2018, nilai tersebut menggambarkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut paling rendah dibandingkan dengan perusahaan lain yang dijadikan sampel. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0.615 (61,5%) yang dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2015, nilai ini menggambarkan bahwa terdapat banyak pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dibandingkan perusahaan lain yang sama-sama dijadikan sampel dalam penelitian. Nilai Minimum dan Maksimum tersebut dipengaruhi dengan rendah tidaknya pengungkapan indikator dalam Biaya CSR di laporan keuangan tahunan. nilai minimum berarti tidak semua indikator CSR diungkapkan di pelaporan tahunan ataupun sebaliknya. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.25169 lebih besar dari standar deviasi yaitu 0.107556, menunjukkan ukuran penyebaran variabel Corporate Social Responsibility memiliki varian atau sebaran yang kecil. Sehingga dapat dikatakan data yang digunakan merupakan data yang baik.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum capital intensity sebesar 0.059 yang dimiliki oleh PT Delta Djakarta Tbk. tahun 2018. Artinya, PT Delta Djakarta Tbk. mempunyai 5,9% asset tetap bersih dan total asset yang besar. Nilai maksimum sebesar 0.673 yang dimiliki PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. tahun 2015. Artinya, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. mempunyai 67,8% asset tetap bersih dan total asset yang kecil. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.35489 lebih besar dari standar deviasi yaitu 0.146883, menunjukkan ukuran penyebaran capital intensity memiliki varian atau sebaran yang kecil. Sehingga dapat dikatakan data yang digunakan merupakan data yang baik.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum komite audit sebesar 3 yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Dan nilai maksimum sebesar 4 yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Hal ini menunjukkan perusahaan Manufaktur sektor barang dan konsumsi di Indonesia cenderung patuh melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit dalam pasal 4, menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang- kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya atau dengan kata lain minimal berjumlah 3 orang. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 3.09 lebih besar dari standar deviasi yaitu 0.283, menunjukkan ukuran penyebaran variabel komite audit memiliki varian atau sebaran yang kecil. Sehingga dapat dikatakan data yang digunakan merupakan data yang baik.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum kepemilikan intitusional sebesar 0.051 yang dimiliki oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk. tahun 2017. Artinya, PT Wismilak Inti Makmur Tbk. memiliki 5,1% kepemilikan pemegang saham yang lebih sedikit dari pemilik institusi. Nilai maksimum sebesar 0.978 yang dimiliki oleh PT Sekar Laut Tbk. tahun 2018. Artinya, PT Sekar Laut Tbk. memiliki 97,8% kepemilikan pemegang saham yang lebih banyak dari pemilik institusi. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.72968 lebih besar dari standar deviasi yaitu 0.197143, menunjukkan ukuran penyebaran variabel kepemilikan institusional memiliki varian atau sebaran yang kecil. Sehingga dapat dikatakan data yang digunakan merupakan data yang baik.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum proporsi dewan komisaris independen sebesar 0.200 yang dimiliki oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tahun 2015. Artinya, PT Kimia Farma (Persero) Tbk. memiliki 20% komisaris independen dari seluruh komisaris. Nilai maksimum sebesar 0.800 yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk. tahun 2015, artinya PT Unilever Indonesia Tbk. memiliki komisaris independen sebesar 80% dari seluruh komisaris. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.41310 lebih besar dari standar deviasi yaitu 0.113918, menunjukkan ukuran penyebaran proporsi dewan komisaris independen memiliki varian atau sebaran yang kecil. Sehingga dapat dikatakan data yang digunakan merupakan data yang baik.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 5.2
Hasil Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Setelah *Outlier*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02917015
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.067
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 5.2 diatas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 5.3
Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.178	.037		4.853	.000		
CSR	.137	.029	.443	4.779	.000	.927	1.079
Capital Intensity	.004	.022	.016	.164	.870	.869	1.151
Komite Audit	.018	.011	.150	1.679	.097	.995	1.005
Kepemilikan Institusional	-.035	.017	-.190	-2.076	.041	.948	1.055
Dewan Komisaris Independen	.036	.028	.121	1.273	.206	.884	1.131

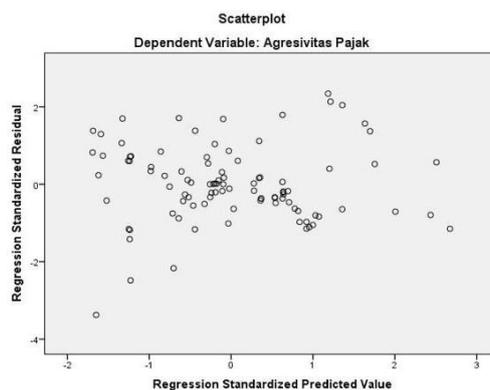
a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 5.3 diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel bebas yang memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan juga tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala Multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 5.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Scatterplot



Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan gambar 5.1 menunjukkan bahwa tidak terjadi heretoskedastisitas. Hal ini dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar tersebut menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi *Tax Aggressiveness* berdasarkan masukan variabel independen CSR, Capital Intensity corporate governance dengan proksi komite audit, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independent.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 5.4
Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.526 ^a	.276	.237	.029961	2.133

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, CSR, Capital Intensity

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Hasil olah data SPSS

Hasil uji autokorelasi pada tabel 5.4 diatas menunjukkan angka Durbin Watson sebesar 2.133, nilai ini akan di lihat dengan tabel DW dengan jumlah observasi (N) 97, jumlah variabel (k)=5 dan tingkat signifikansi 0.05 di dapat nilai dl = 1.5628, nilai du = 1.7790, nilai 4-dl = 2.4372, dan nilai 4-du = 2.2210. Dengan demikian nilai dw berada di antara nilai du dan 4-du, $du < dw < 4-du$ atau $1.7790 < 2.133 < 2.2210$ sehingga dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

3. Hasil Uji Kelayakan Model

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.526 ^a	.276	.237	.029961

Sumber: Hasil olah data SPSS

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0.276 yang berarti bahwa variabilitas variabel agresivitas pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel independen corporate social responsibility, capital intensity dan corporate governance dengan proksi komite audit, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen dalam penelitian ini adalah sebesar 27.6% sedangkan sisanya sebesar 72.4% dijelaskan oleh variabel- variabel di luar model penelitian.

b. Hasil Uji F

Tabel 5.6
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.031	5	.006	6.949	.000 ^b
	Residual	.082	91	.001		
	Total	.113	96			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, CSR, Capital Intensity

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 5.6 dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh secara simultan. Hal ini dapat di tunjukkan dengan nilai (Sig.) $0.00 < 0.05$ dan nilai F-hitung sebesar 6.949, maka

dapat disimpulkan bahwa pada persamaan secara simultan atau bersama-sama variabel independen corporate social responsibility, capital intensity dan corporate governance dengan proksi komite audit, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap variabel agresivitas pajak.

c. Hasil Uji t

Tabel 5.7
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.178	.037		4.853	.000
CSR	.137	.029	.443	4.779	.000
Capital Intensity	.004	.022	.016	.164	.870
Komite Audit	.018	.011	.150	1.679	.097
Kepemilikan Institusional	-.035	.017	-.190	-2.076	.041
Dewan Komisaris Independen	.036	.028	.121	1.273	.206

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Hasil olah data SPSS

Analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, capital intensity dan corporate governance dengan proksi komite audit, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris terhadap *Tax Aggressiveness*. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dijelaskan melalui model regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.178 + 0.137 \text{ CSR}_i + 0.004 \text{ CI} + 0.018 \text{ KA} - 0.035 \text{ KI} + 0.036 \text{ PDK}$$

1. Pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Aggressiveness*

Pengungkapan Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Kewajiban perusahaan adalah membayar pajak secara wajar sesuai dengan hukum perpajakan. Pengungkapan CSR yang semakin besar akan membuat citra perusahaan semakin baik, sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan lancar. Pemenuhan kewajiban CSR dilakukan perusahaan untuk menutupi citra perusahaan agar semata-mata terlihat baik, mendapat dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Semakin besar pengungkapan CSR, maka semakin tinggi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Hardiningsih (2016) dan Mustika (2017) yang menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap tax aggressiveness. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Wijayanti dan Rismawati (2016) yang menunjukkan pengungkapan Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Aggressiveness*

Intensitas modal (*Capital Intensity*) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tujuan perusahaan manufaktur melakukan investasi aset tetap adalah untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. *Capital intensity* merupakan kebutuhan bagi perusahaan. Perusahaan melakukan investasi aset tetap dengan menambah gedung, tanah, peralatan, bangunan, mesin, dan lain sebagainya adalah dengan tujuan untuk mendukung operasional perusahaan. Selain itu, aset tetap digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan keuntungan perusahaan. Perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan dengan memiliki aset tetap yang tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat aset tetap yang tinggi dapat

mendorong peningkatan kapasitas produksi. Ketika perusahaan berinvestasi pada aset tetap dimotivasi oleh penghindaran pajak maka justru tidak ditemukan korelasi karena adanya tambahan beban penyusutan aset yang membuat laba perusahaan menurun. Sehingga tinggi rendahnya capital intensity tidak mempunyai pengaruh terhadap upaya penghindaran pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) yang menunjukkan bahwa Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Jessica dan Toly (2014) serta Putri (2016) yang menunjukkan bahwa Capital Intensity berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

3. Pengaruh pengungkapan Komite Audit terhadap *Tax Aggressiveness*

Komite Audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu sedikit atau banyaknya anggota komite audit tidak akan mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena kecenderungan perusahaan melakukan praktek agresivitas pajak bukan dari jumlah komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan agresivitas pajak atau tidak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peran komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) serta Utami dan Setyawan (2015) yang menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Diantri dan Ulupui (2016) serta Maharani dan Suardana (2014) yang menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

4. Pengaruh pengungkapan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Aggressiveness*

Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini karena Kepemilikan Institusional mampu memainkan peran penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen agar menghindari perilaku untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen dalam melakukan praktik agresivitas pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al (2016) yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Damayanti dan Susanto (2015) serta Maharani dan Suardana (2014) yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

5. Pengaruh pengungkapan Proporsi Dewan Komisaris terhadap *Tax Aggressiveness*

Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap variabel agresivitas pajak. Besar kecilnya proporsi dewan komisaris di dalam suatu perusahaan tidak menentukan efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Dalam prakteknya dewan komisaris tidak bekerja secara optimal sesuai dengan peran yang seharusnya dilaksanakan. Karena banyaknya pemegang saham yang merangkap jabatan sebagai dewan komisaris dalam suatu perusahaan, sehingga pemegang saham belum melihat efektivitas dewan komisaris di dalam suatu perusahaan sebagai pengawas kinerja manajer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al (2016) serta Putra dan Merkusiwati (2016) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Diantri dan Ulupui (2016) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. Temuan penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan menentukan seberapa besar Tindakan Agresivitas Pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan membayar beban pajak lebih kecil.

Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. Temuan penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya Capital Intensity tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.

Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. Temuan penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak atau tidaknya anggota Komite Audit tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.

Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. Temuan penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kepemilikan Institusional mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen dalam melakukan praktik agresivitas pajak.

Proporsi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. Temuan penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya Proporsi Dewan Komisaris tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3).
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2).
- Cahyono. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan AgresivitasPajak. In *Journal of Accounting* (p.2). Bandung.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Diantari, P., & Ulupui, I. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E- Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702–732.

- Feranika, A. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Diponegoro, Badan Penerbit Universitas.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). PSAK 16 (Revisi 2015): Aset Tetap. Jakarta: IAI.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris perusahaan Manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1, 1.
- Jessica, & Agus Arianto Toly. (2014). Pengaruh Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility.
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(3).
- Laksana, J. (2015). Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2008- 2012). *E-Jurnal Akuntansi*, 11(1), 269–288.
- Maharani, I., & Suardana, K. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mgbame, C. O., Chijoke-Mgbame, M. A., Yekini, S., & Yekini, C. K. (2017). Journal of Accounting and Taxation Corporate social responsibility performance and tax aggressiveness. *Academic Journals*, 9(8), 101–108. Retrieved from <http://www.academicjournals.org/JAT>
- Midiastuty, P. P., Suranta, E., Indriani, R., & Putri, S. I. (2016). Pengaruh Kepemilikan Pengendali dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Jurnal Universitas Lampung*.
- Mustika, Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JOM Fekon*, 4.
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–14.
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Business Administration*, 1(2).
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia.
- Putri, L. T. Y. (2014). Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2008-2012). *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang*.

- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. *SNA 17 Mataram Universitas Mataram*, 24–27.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sumarsan, T. (2013). *Perpajak Indonesia: Edisi 3*. Jakarta: PT Indeks.
- Utami, W. T., & Setyawan, H. (2015). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tindakan Agresif dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *Journal of UNISSULA*, 2.
- Waluyo. (2011). *Akuntansi Pajak Edisi Jakarta: Salemba Empat*.
- Wati. (2018). *Metodologi Penelitian Terapan, Aplikasi SPSS, EVIEWS, Smart PLS dan AMOS*. Jakarta: Pustaka AMRI.